

# **MAKALAH**

## **STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA**

*Makalah disampaikan pada seminar nasional Pendidikan Teknologi dan Kejuruan (PTK)  
di kampus Fakultas Pendidikan Teknologi dan Kejuruan Universitas Pendidikan Indonesia  
tanggal 25 Nopember 2006*

**Oleh:  
Sriyono**

**FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNOLOGI DAN KEJURUAN  
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
BANDUNG  
2006**

## STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA

Sriyono

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional (RPJP Depdiknas) tahun 2005-20, secara bertahap rasio jumlah lembaga pendidikan kejuruan (SMK) dibanding pendidikan umum (SMA) akan berubah secara signifikan. Perubahan tersebut akan mengarah kepada semakin banyaknya SMK dibanding SMA, dari kondisi saat ini dengan rasio 30%:70% menjadi 70%:30%. Sementara tinjauan kondisi nyata output pendidikan kejuruan saat ini ditinjau dari aspek kualitas, efisiensi, relevansi, dan produktivitas secara umum masih rendah.

Bertolak dari beberapa aspek tentang rendahnya output pendidikan kejuruan (kualitas, efisiensi, relevansi, dan produktivitas) dewasa ini diperlukan suatu strategi perencanaan dan pengembangan yang dapat meningkatkan output pendidikan kejuruan tersebut. Strategi perencanaan dan pengembangan yang relevan dan dapat memayungi seluruh aspek tersebut adalah upaya optimalisasi dan revitalisasi program *link and match*. Strategi ini memiliki cakupan yang sangat luas dan memuat pembaruan dan perubahan dalam dunia pendidikan kejuruan, yakni pembaruan dan perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit menjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai dimensi pembaruan dan perubahan yang diturunkan dari program *link and match* ini yaitu perubahan dari/ke: 1) pendekatan *supply driven* ke *demand driven*; 2) pendidikan berbasis sekolah ke sistem berbasis ganda; 3) model pengajaran ke model pembelajaran berbasis kompetensi; 4) program dasar yang sempit program dasar yang mendasar, kuat dan luas; 5) sistem pendidikan ke sistem yang luwes dan menganut prinsip *multy entry, multy exit*; 6) sistem yang mengakui keahlian yang diperoleh dari manapun; 7) sistem baru yang mengintegrasikan pendidikan dan pelatihan kejuruan secara terpadu; 8) sistem terminal ke sistem berkelanjutan

Strategi perencanaan dan pengembangan pendidikan kejuruan saat ini dan untuk masa yang akan datang sebaiknya selalu didasarkan kepada *demand driven*. Secara garis besar strategi ini mencakup perumusan visi, misi, tujuan sekolah dan strategi pelaksanaannya. Selain itu ada rencana kerja tahunan yang meliputi pengidentifikasian sasaran, pemilihan fungsi-fungsi yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah diidentifikasi, analisis SWOT, langkah-langkah pemecahan persoalan, dan penyusunan rencana dan program kerja tahunan. Melalui strategi ini diharapkan pendidikan kejuruan di Indonesia akan menjadi primadona dan pilihan utama saat ini dan yang akan datang sejalan dengan kebijakan yang diterapkan.

# STRATEGI PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA

Sriyono

## A. PENDAHULUAN

Pembangunan bidang pendidikan merupakan suatu proses yang dinamis sejalan dengan perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan masyarakat. Perkembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi terutama dalam bidang teknologi informasi telah memberikan dampak terhadap percepatan perubahan yang terjadi didalam masyarakat. Perubahan yang berjalan relatif cepat tersebut juga mempengaruhi dinamika perubahan kebijakan dalam dunia pendidikan. Pembangunan nasional dalam bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang upaya peningkatan mutu sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Hal ini sejalan dengan yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN), Bab II Pasal 3 menyatakan bahwa:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan serta membentuk watak dan peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

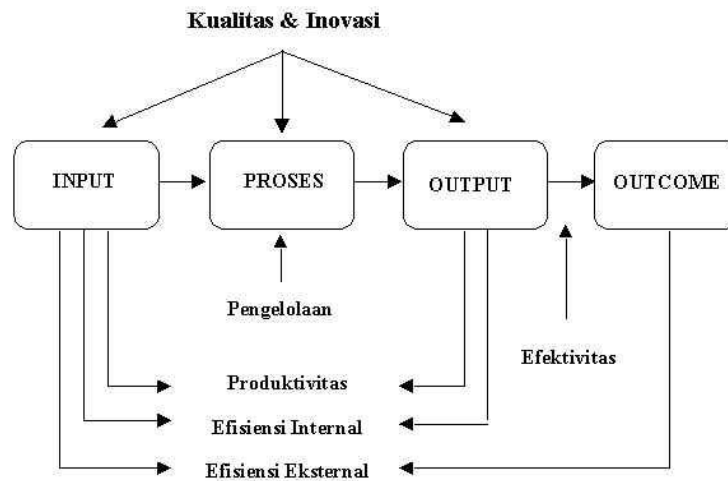
Pendidikan menengah kejuruan merupakan sub-sistem pendidikan nasional juga mengalami perubahan demi perbaikan dan peningkatan kualitas hasil pendidikan. Perencanaan dan pengembangan pendidikan menengah kejuruan dilakukan guna mengantisipasi kebutuhan dan tantangan masa depan. Hal ini perlu terus-menerus dilakukan, diselaraskan dengan kebutuhan perkembangan dunia usaha dan dunia industri, dunia kerja, serta ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengembangan pendidikan menengah kejuruan juga diharapkan dapat meningkatkan mutu dalam menciptakan tenaga kerja terampil dalam memenuhi

kebutuhan dunia usaha dan dunia industri, serta mencetak jiwa yang mampu menciptakan lapangan kerja sendiri (*entrepreneurship*).

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) merupakan jenjang pendidikan dibawah pembinaan Direktorat Pendidikan Menengah Kejuruan (Ditdikmenjur), yang menyiapkan lulusannya untuk bekerja dalam bidang tertentu dengan bekal pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan dunia industri atau berwirausaha. Hal itu tersirat didalam UUSPN Pasal 18 dan penjelasan Pasal 15 yang mengatur pendidikan menengah kejuruan. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Departemen Pendidikan Nasional (RPJP Depdiknas) tahun 2005-2025 SMK akan menjadi *icon* dalam perkembangan dunia pendidikan menengah di negara kita. Secara bertahap rasio jumlah lembaga pendidikan kejuruan (SMK) dibanding pendidikan umum (SMA) akan berubah secara signifikan. Perubahan tersebut akan mengarah kepada semakin banyaknya SMK dibanding SMA, dari kondisi saat ini dengan rasio 30%:70% menjadi 70%:30%. Sementara tinjauan kondisi nyata output pendidikan kejuruan saat ini ditinjau dari aspek kualitas, efisiensi, relevansi, dan produktivitas secara umum masih rendah. Oleh karena itu perlu suatu strategi perencanaan dan pengembangan pendidikan kejuruan yang bisa mengantisipasi kondisi nyata output tersebut.

## **B. KONDISI NYATA OUTPUT PENDIDIKAN KEJURUAN INDONESIA**

Kondisi nyata output pendidikan kejuruan diukur melalui kinerja dari lembaga pendidikan yang bersangkutan. Kinerja lembaga pendidikan adalah pencapaian/ prestasi yang dihasilkan oleh proses/perilaku lembaga pendidikan. Menurut Slamet PH (2002), kinerja lembaga pendidikan dapat diukur dari efektivitasnya, kualitasnya, produktivitasnya, efisiensinya, kualitas kehidupan kerjanya, dan moral kerjanya, dengan keterangan seperlunya seperti gambaran berikut:



Gambar Kinerja Lembaga Pendidikan Kejuruan  
(Sumber: Slamet PH, 2002)

### 1. Aspek Kualitas

Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa, yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang ditentukan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan kejuruan, kualitas yang dimaksud adalah kualitas lulusan sekolah yang bersifat akademik dan non-akademik. Mutu lulusan sekolah dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input dan proses persekolahan.

### 2. Aspek Efisiensi

Efisiensi dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu efisiensi internal dan efisiensi eksternal. Efisiensi internal menunjuk kepada hubungan antara output sekolah (pencapaian prestasi belajar) dan input (sumberdaya) yang digunakan untuk memproses/menghasilkan output sekolah. Efisiensi internal sekolah biasanya diukur dengan biaya-efektivitas. Setiap penilaian biaya-efektivitas selalu memerlukan dua hal, yaitu penilaian ekonomik untuk mengukur biaya masukan (input) dan penilaian hasil pembelajaran (prestasi belajar, lama belajar, angka putus sekolah).

### 3. Aspek Relevansi

Ada dua ironi besar berkenaan dengan aspek relevansi pendidikan kejuruan di negara kita. Pertama, di satu sisi dunia usaha dan dunia industri membutuhkan tenaga-tenaga kerja terampil dari sekolah-sekolah kejuruan. Di sisi lain,

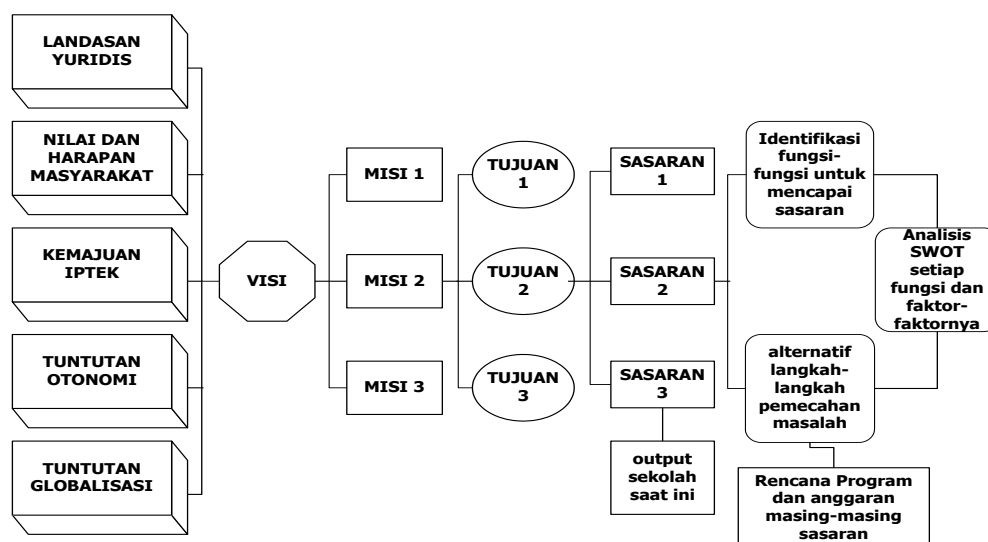
pendidikan kejuruan masih belum mampu memenuhi tuntutan standar yang diberikan oleh dunia usaha dan dunia industri. Kedua, ada sekitar 17% tingkat pengangguran lulusan SLTA kejuruan (Elwin, 2002), hal ini ditengarai karena begitu sulit menemukan tenaga kerja yang benar-benar siap pakai.

#### 4. Aspek Produktivitas

Produktivitas adalah perbandingan antara output sekolah dibanding input sekolah. Baik output maupun input sekolah adalah dalam bentuk kuantitas. Kuantitas input sekolah, misalnya jumlah guru, modal sekolah, bahan, dan energi. Kuantitas output sekolah, misalnya jumlah siswa yang lulus sekolah setiap tahunnya. Contoh produktivitas, misalnya, jika tahun ini sebuah sekolah lebih banyak meluluskan siswanya dari pada tahun lalu dengan input yang sama (jumlah guru, fasilitas, dsb.), maka dapat dikatakan bahwa tahun ini sekolah tersebut lebih produktif dari pada tahun sebelumnya. Berkenaan dengan aspek produktivitas ini hal yang biasa ditemukan di lapangan adalah tidak adanya kesimbangan dengan aspek lainnya sehingga secara kuantitas sekolah kejuruan lebih produktif tetapi secara kualitas belum tentu demikian.

### C. PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN KEJURUAN DI INDONESIA

Menurut Slamet PH (2002), prosedur perencanaan pendidikan kejuruan secara skematik digambarkan sebagai berikut:



## 1. Merumuskan Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Lembaga Pendidikan

Setiap lembaga pendidikan kejuruan harus membuat rencana pengembangan lembaga pendidikan. Rencana pengembangan lembaga pendidikan kejuruan pada umumnya mencakup perumusan visi, misi, tujuan lembaga pendidikan dan strategi pelaksanaannya. Sedangkan rencana kerja tahunan lembaga pendidikan pada umumnya meliputi pengidentifikasian sasaran lembaga pendidikan (tujuan situasional lembaga pendidikan), pemilihan fungsi-fungsi lembaga pendidikan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah diidentifikasi, analisis SWOT, langkah-langkah pemecahan persoalan, dan penyusunan rencana dan program kerja tahunan lembaga pendidikan. Berikut diuraikan secara singkat mengenai perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran lembaga pendidikan kejuruan (tujuan situasional lembaga pendidikan).

### ***Merumuskan Visi***

Setiap lembaga pendidikan kejuruan harus memiliki visi. Visi adalah wawasan yang menjadi sumber arahan bagi lembaga pendidikan kejuruan dan digunakan untuk memandu perumusan misi lembaga pendidikan. Dengan kata lain, visi adalah pandangan jauh ke depan kemana lembaga pendidikan akan dibawa. Visi adalah gambaran masa depan yang diinginkan oleh lembaga pendidikan kejuruan, agar lembaga pendidikan yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya.

Gambaran tersebut tentunya harus didasarkan pada landasan yuridis, yaitu undang-undang pendidikan dan sejumlah peraturan pemerintahnya, khususnya tujuan pendidikan nasional sesuai jenjang dan jenis lembaga pendidikannya dan juga sesuai dengan profil lembaga pendidikan yang bersangkutan. Dengan kata lain, visi lembaga pendidikan kejuruan harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan nasional tetapi sesuai dengan kebutuhan anak dan masyarakat yang dilayani. Tujuan pendidikan nasional sama tetapi profil lembaga pendidikan khususnya potensi dan kebutuhan masyarakat yang dilayani lembaga pendidikan tidak selalu sama. Oleh karena itu dimungkinkan

setiap lembaga pendidikan kejuruan memiliki visi yang tidak sama, asalkan tidak keluar dari koridor nasional yaitu tujuan pendidikan nasional.

### ***Merumuskan Misi***

Misi adalah tindakan untuk mewujudkan visi tersebut. Karena visi harus mengakomodasi semua kelompok kepentingan yang terkait dengan lembaga pendidikan, maka misi dapat juga diartikan sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan masing-masing kelompok yang terkait dengan lembaga pendidikan. Dalam merumuskan misi, harus mempertimbangkan tugas pokok lembaga pendidikan dan kelompok-kelompok kepentingan yang terkait dengan lembaga pendidikan. Dengan kata lain, misi adalah bentuk layanan untuk memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya.

### ***Merumuskan Tujuan***

Bertolak dari visi dan misi, selanjutnya lembaga pendidikan merumuskan **tujuan**. Tujuan merupakan “apa” yang akan dicapai/dihasilkan oleh lembaga pendidikan yang bersangkutan dan “kapan” tujuan akan dicapai. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, maka tujuan dikaitkan dengan jangka waktu 3-5 tahun. Dengan demikian tujuan pada dasarnya merupakan tahapan wujud lembaga pendidikan menuju visi yang telah dicanangkan.

### ***Merumuskan Sasaran/Tujuan Situasional***

Setelah tujuan lembaga pendidikan (tujuan jangka menengah) dirumuskan, maka langkah selanjutnya adalah menetapkan **sasaran/target/tujuan situasional/tujuan jangka pendek**. Sasaran adalah penjabaran tujuan, yaitu sesuatu yang akan dihasilkan/dicapai oleh lembaga pendidikan dalam jangka waktu lebih singkat dibandingkan tujuan lembaga pendidikan. Rumusan sasaran harus selalu mengandung **peningkatan**, baik peningkatan kualitas, efektivitas, produktivitas, maupun efisiensi. Agar sasaran dapat dicapai dengan efektif, maka sasaran harus dibuat spesifik, terukur, jelas kriterianya, dan disertai indikator-indikator yang rinci. Meskipun sasaran bersumber dari tujuan, namun dalam penentuan sasaran yang mana dan berapa besar kecilnya sasaran, tetap harus didasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh lembaga pendidikan.



## 2. Analisis Tingkat Kesiapan Lembaga Pendidikan

Setelah aspek-aspek tantangan nyata pada lembaga pendidikan diidentifikasi, maka langkah berikutnya adalah menentukan tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya melalui analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*). Analisis SWOT dilakukan dengan maksud untuk mengenali tingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi lembaga pendidikan yang diperlukan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui tingkat kesiapan setiap fungsi dan faktor-faktornya dicapai melalui membandingkan faktor dalam kondisi nyata dengan faktor dalam kriteria kesiapan. Yang dimaksud dengan kriteria kesiapan faktor adalah faktor yang memenuhi kriteria untuk mencapai sasaran/tujuan situasional. Faktor yang memenuhi kriteria/standar ini ditemukan melalui perhitungan-perhitungan atau pertimbangan-pertimbangan yang bersumber pada pencapaian sasaran.

Berhubung tingkat kesiapan fungsi ditentukan oleh tingkat kesiapan masing-masing faktor yang terlibat pada setiap fungsi, maka analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. Faktor internal adalah faktor-faktor pada setiap fungsi yang berada didalam kewenangan lembaga pendidikan. Sedangkan yang dimaksud faktor eksternal adalah faktor-faktor pada setiap fungsi yang berada diluar kewenangan lembaga pendidikan.

Tingkat kesiapan harus memadai, artinya, minimal memenuhi ukuran/kriteria kesiapan yang diperlukan untuk mencapai sasaran, yang dinyatakan sebagai: *kekuatan*, bagi faktor yang tergolong internal; *peluang*, bagi faktor yang tergolong eksternal. Sedang tingkat kesiapan yang kurang memadai, artinya tidak memenuhi ukuran kesiapan, dinyatakan bermakna: *kelemahan*, bagi faktor yang tergolong internal; dan *ancaman*, bagi faktor yang tergolong eksternal. Baik kelemahan maupun ancaman, sebagai faktor yang memiliki tingkat kesiapan kurang memadai, disebut *persoalan*.

### 3. Mengidentifikasi Tantangan Nyata Lembaga pendidikan

Pada tahap ini, lembaga pendidikan melakukan analisis output lembaga pendidikan yang hasilnya berupa identifikasi tantangan nyata yang dihadapi oleh lembaga pendidikan. Tantangan adalah selisih (ketidaksesuaian) antara output lembaga pendidikan saat ini dan output lembaga pendidikan yang diharapkan di masa yang akan datang (tujuan lembaga pendidikan). Besar kecilnya ketidaksesuaian antara output lembaga pendidikan saat ini (kenyataan) dengan output lembaga pendidikan yang diharapkan (idealnya) di masa yang akan datang memberitahukan besar kecilnya tantangan. Pada umumnya, tantangan lembaga pendidikan bersumber dari output lembaga pendidikan yang dapat dikategorikan menjadi empat, yaitu kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi.

Bertolak dari beberapa aspek tentang rendahnya output pendidikan kejuruan (kualitas, efisiensi, relevansi, dan produktivitas) dewasa ini diperlukan suatu kerangka pengembangan pendidikan yang dapat meningkatkan output pendidikan kejuruan tersebut. Strategi pengembangan yang relevan dan dapat memayungi seluruh aspek tersebut adalah kebijakan *link and match*. Kebijakan ini memiliki cakupan yang sangat luas dan memuat pembaruan dan perubahan dalam dunia pendidikan kejuruan, yakni pembaruan dan perubahan dari pola lama yang cenderung berbentuk pendidikan demi pendidikan ke suatu yang lebih terang, jelas dan konkrit menjadi pendidikan kejuruan sebagai program pengembangan sumberdaya manusia. Berbagai dimensi pembaruan dan perubahan yang diturunkan dari strategi *link and match* (Wardiman, 1993) antara lain:

- b. Perubahan Dari Pendekatan *Supply Driven* Ke *Demand Driven*
- c. Perubahan Dari Pendidikan Berbasis Sekolah (*School Based Program*) Ke Sistem Berbasis Ganda (*Dual Based Program*)
- d. Perubahan Dari Model Pengajaran Berbasis Mata-Mata Pelajaran Ke Model Pengajaran Berbasis Kompetensi
- e. Perubahan Dari Program Dasar Yang Sempit (*Narrow Based*) Program Dasar Yang Mendasar, Kuat Dan Luas (*Broad Based*)

- f. Perubahan Dari Sistem Pendidikan Formal Yang Kaku, Ke Sistem Yang Luwes Dan Menganut Prinsip *Multy Entry, Multy Exit*
- g. Perubahan Dari Sistem Yang Tidak Mengakui Keahlian Yang Telah Diperoleh Sebelumnya, Ke Sistem Yang Mengakui Keahlian Yang Diperoleh Dari Mana Dan Dengan Cara Apapun Kompetensi Itu Diperoleh (*Recognition Of Prior Learning*)
- h. Perubahan Dari Pemisahan Antara Pendidikan Dengan Pelatihan Kejuruan, Ke Sistem Baru Yang Mengintegrasikan Pendidikan Dan Pelatihan Kejuruan Secara Terpadu
- i. Perubahan Dari Sistem Terminal Ke Sistem Berkelanjutan

#### **D. PENUTUP**

Mengubah paradigma pendidikan kejuruan di Indonesia dari pola sentralistik ke desentralistik dewasa ini (masa transisi) merupakan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak. Pendidikan kejuruan di Indonesia pada masa transisi ini memerlukan penyesuaian-penyesuaian, baik sistemnya, kulturnya, maupun figurnya, dengan tuntutan-tuntutan baru berdasarkan tantangan nyata output pendidikan saat ini (kualitas, produktivitas, efektivitas, dan efisiensi). Oleh karena itu pada masanya nanti (tahun 2025) dengan proporsi 70% pendidikan kejuruan di Indonesia akan menjadi *icon* dan penentu dalam mengisi pembangunan.

Fleksibilitas dan eksperimentasi-eksperimentasi implementasi strategi dan kebijakan, yang menghasilkan kemungkinan-kemungkinan baru dalam penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan kejuruan perlu terus didorong. Dengan demikian sejalan dengan perkembangannya pendidikan kejuruan akan semakin *establihsed* dalam mengisi peran-perannya saat ini dan di masa yang akan datang.

## **E. PUSTAKA ACUAN**

Departemen Pendidikan Nasional (2005). *Rencana Pembangunan Jangka Panjang*. Jakarta: Depdiknas

Departemen Pendidikan Nasional (2003) *Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan nasional*, Jakarta : Depdiknas.

Dikmenjur. (2003). *Kebutuhan tenaga kerja tamatan smk kota bandung*. Diambil pada tanggal 1 September 2004 dari [http://peta.dikmenjur.net/siskej/data/potensi/B0273/Perkembangan kebutuhan tenaga kerja.htm](http://peta.dikmenjur.net/siskej/data/potensi/B0273/Perkembangan%20kebutuhan%20tenaga%20kerja.htm)

Elwin Tobing. (2002). *Pendidikan, pasar tenaga kerja dan kewiraswastaan*. Diambil pada tanggal 1 September 2004 dari <http://www.theindonesianinstitute.org/daily041502.htm>

Wardiman Djoyonegoro. (1993). *Pengembangan Sumberdaya Manusia melalui Sekolah Menengah Kejuruan*. Jakarta: Depdiknas.

Slamet PH. (2002). *Manajemen Berbasis Sekolah*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan. Jakarta: Depdiknas

[http://www.depdiknas.go.id/serba\\_serbi/dpks/Kinerja.htm](http://www.depdiknas.go.id/serba_serbi/dpks/Kinerja.htm)